Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 23315-23319

ANALISIS HAMBATAN OPERASIONAL PASAR IKAN MODERN PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

M. Ronaldo[1], Ainur Ropik2, Siti Anisyah[3]

[1,2,3]Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: M. Ronaldo , e-mail: muhammadronaldo0307@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya operasional Pasar Ikan Modern di Kota Palembang yang ditandai dengan rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas serta terbatasnya aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan operasional pasar ikan modern dalam perspektif ekonomi politik, yang menekankan pada interaksi antara kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, rendahnya efisiensi serta daya saing pasar terhadap pasar tradisional, dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan operasional. Selain itu, terdapat pengaruh kepentingan politik dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi fungsi pasar. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penghambat dalam pengoperasian pasar secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam aspek kebijakan, peningkatan kapasitas pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku pasar untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Ikan Modern di Palembang sebagai pusat distribusi dan perdagangan ikan yang efisien dan berdaya saing.

Kata Kunci: Ekonomi politik, analisis hambatan operasional

ABSTRACT

This study is motivated by the suboptimal operation of the Modern Fish Market in Palembang City, which is indicated by the low level of facility utilization and limited trading activities. The purpose of this study is to analyze the operational constraints of the modern fish market from a political economy perspective, which emphasizes the interaction between economic interests, political power, and institutional structures.The method used in this study is a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the main obstacles include limited budgets for infrastructure development and maintenance, low efficiency and competitiveness compared to traditional markets, and weak supervision in operational management. In addition, political interests and government policies have not fully supported the optimization of the market's function. The lack of coordination among stakeholders also becomes a barrier to the sustainable operation of the market. Therefore, improvements in policy aspects, enhancement of management capacity, and stronger synergy between the government and market actors are needed to optimize the function of the Modern Fish Market in Palembang as an efficient and competitive center for fish distribution and trade.

Keywords: Political economy, Analiysis of operational constraints

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Ekonomi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara kegiatan ekonomi dengan kekuasaan politik dalam suatu masyarakat. Ilmu ini menelaah bagaimana kebijakan pemerintah, kepentingan aktor, serta struktur kelembagaan memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya.Secara sederhana, ekonomi politik tidak hanya melihat "bagaimana ekonomi bekerja", tetapi juga "siapa yang mengatur, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi keputusan ekonomi".(Mohamad Stevan Alim, S.IP, 2024)

Dalam perspektif klasik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, ekonomi politik berkaitan dengan bagaimana individu mengejar kepentingannya (*self-interest*) dalam sistem pasar, yang kemudian diatur secara alami melalui mekanisme *invisible hand*. Namun, dalam perkembangan modern, ekonomi politik juga menyoroti peran negara, konflik kepentingan, serta dinamika antara sektor publik dan privat.(Dr. Asep Nurjaman, 2020)

Pembangunan sektor perikanan merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kota Palembang yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Dalam rangka meningkatkan kualitas distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pemerintah telah membangun Pasar Ikan Modern sebagai sarana perdagangan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kebersihan, serta daya saing pasar. Namun, dalam praktiknya, operasional pasar tersebut belum berjalan secara optimal sebagaimana yang direncanakan.(Ikhsan, 2023)

Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas, minimnya aktivitas perdagangan, serta kurangnya partisipasi pedagang dalam memanfaatkan pasar ikan modern. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha masih cenderung memilih pasar tradisional yang dianggap lebih fleksibel dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan pasar modern dengan realitas di lapangan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Dalam perspektif ekonomi politik, operasional pasar dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kekuasaan yang dimiliki oleh para aktor terkait. Keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam pengoperasian pasar secara efektif dan berkelanjutan. (Yusri, 2020)

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai hambatan operasional Pasar Ikan Modern di Palembang. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan operasional pasar, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya optimalisasi fungsi Pasar Ikan Modern sebagai pusat distribusi dan perdagangan ikan yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hambatan operasional Pasar Ikan Modern di Palembang dalam perspektif ekonomi politik. Lokasi penelitian berada di Pasar Ikan Modern Palembang, dengan fokus pada kondisi operasional serta interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan pasar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif terkait dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi operasional pasar.(Sugiono, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan terkait seperti pengelola pasar, pedagang, dan pihak pemerintah, serta studi dokumentasi terhadap data dan kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, mereduksi, dan menafsirkan data untuk menemukan pola serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Hasil analisis kemudian

diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori ekonomi politik guna menjelaskan berbagai hambatan operasional serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hambatan operasional pasar ikan modern palembang

Operasionalisasi Pasar Ikan Modern (PIM) di Palembang tidak hanya dapat dipahami dari aspek teknis pengelolaan, tetapi juga melalui perspektif ekonomi politik yang menekankan interaksi antara kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, serta struktur kelembagaan. Pembangunan pasar ini pada awalnya ditujukan sebagai pusat perdagangan ikan yang higienis, nyaman, dan modern di wilayah Sumatera Selatan, dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, operasional pasar tersebut belum berjalan secara optimal.(Dharmawangsa, 2022)

Rendahnya aktivitas jual beli, banyaknya lapak yang tidak terisi, serta terbatasnya distribusi ikan menunjukkan bahwa pasar modern belum mampu menarik partisipasi pelaku usaha secara signifikan. Dalam perspektif ekonomi politik Adam Smith, kondisi ini berkaitan erat dengan konsep *self-interest*, di mana pedagang dan distributor cenderung mengambil keputusan ekonomi berdasarkan pertimbangan keuntungan, efisiensi, dan kepastian pendapatan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang lebih memilih bertahan di pasar tradisional karena telah memiliki pelanggan tetap dan perputaran barang yang lebih cepat, sehingga risiko kerugian relatif lebih kecil.

Selain itu, mekanisme *invisible hand* terlihat dari pola distribusi ikan yang tetap berjalan melalui jalur informal di luar pasar modern. Distributor memilih menjual langsung ke pasar tradisional karena dinilai lebih efisien dan menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bekerja secara alami tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem formal yang disediakan pemerintah. Dalam konteks *free market*, kebebasan pelaku usaha dalam memilih lokasi dan sistem distribusi menyebabkan pasar modern tidak menjadi pilihan utama, karena belum mampu bersaing dengan jaringan sosial dan basis konsumen yang telah terbentuk di pasar tradisional.(Azisah, 2022)

Dari sisi *limited government*, pemerintah telah berperan dalam pembangunan dan pengelolaan pasar, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan penetapan kebijakan. Namun, intervensi tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan fasilitas serta adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dengan preferensi pelaku usaha. Dengan demikian, peran pemerintah masih perlu diperkuat, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga dalam pengelolaan yang adaptif dan responsif.

Dalam aspek efisiensi dan kompetisi pasar, PIM Palembang juga menghadapi kendala signifikan. Infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai serta jumlah pembeli yang terbatas menyebabkan pasar modern kurang kompetitif dibandingkan pasar tradisional. Proses distribusi yang lebih panjang dan terbatasnya variasi produk menjadi faktor tambahan yang menurunkan daya tarik pasar modern.

Dari sisi operasional, struktur pembiayaan pasar menunjukkan adanya diferensiasi ekonomi melalui penetapan tarif sewa lapak, yaitu Rp600.000 untuk lapak ikan dan Rp2.500.000 untuk area food court. Kebijakan ini mencerminkan upaya pengelola dalam menyeimbangkan antara optimalisasi pendapatan dan kemampuan pelaku usaha. Namun, pada aspek perawatan, pengelolaan fasilitas pada tahap awal belum dilakukan secara optimal, meskipun terdapat upaya pengawasan kualitas ikan melalui kerja sama dengan pihak karantina.

Lebih lanjut, hambatan operasional pasar dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek utama. Pertama, keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berdampak pada kurang optimalnya fasilitas pendukung. Kedua, rendahnya efisiensi dan daya saing pasar dibandingkan pasar tradisional. Ketiga, lemahnya pengawasan yang menyebabkan implementasi aturan tidak berjalan secara konsisten. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memperkuat hambatan dalam operasional pasar.

Selain faktor struktural, kepentingan aktor juga berperan signifikan dalam memengaruhi operasional pasar. Pemerintah, pedagang, distributor, dan konsumen memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pedagang cenderung mengutamakan stabilitas pendapatan, sementara pemerintah

berfokus pada modernisasi sistem pasar. Ketidaksesuaian kepentingan ini menyebabkan pasar tidak berkembang secara optimal. Dalam konteks *invisible hand*, perbedaan kepentingan tersebut mendorong pelaku usaha untuk tetap menggunakan sistem yang dianggap paling menguntungkan secara individu. Upaya untuk mengaktifkan kembali pasar juga menghadapi kendala, meskipun terdapat inisiatif dari pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, belum tercapainya kesepakatan serta adanya ketentuan komposisi produk (60% ikan dan 40% non-ikan) menjadi hambatan tambahan dalam menarik investor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang kurang fleksibel dapat menghambat proses revitalisasi pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan operasional Pasar Ikan Modern Palembang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan kelembagaan. Ketidaksesuaian kepentingan antar aktor, lemahnya kapasitas pengelolaan, serta rendahnya daya saing pasar menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas manajemen, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan agar pasar dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, operasionalisasi Pasar Ikan Modern (PIM) Palembang dalam perspektif ekonomi politik menunjukkan bahwa keberadaan pasar tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, serta struktur kelembagaan. Pembangunan PIM yang bertujuan menciptakan pusat perdagangan ikan yang modern, higienis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku UMKM, pada kenyataannya belum berjalan optimal dalam tahap operasionalnya.

Analisis menggunakan indikator ekonomi politik Adam Smith self-interest, invisible hand, free market, limited government, serta efisiensi dan kompetisi pasar menunjukkan bahwa perilaku pelaku usaha lebih didominasi oleh kepentingan individu (self-interest), khususnya dalam mencari kepastian pendapatan. Hal ini menyebabkan pedagang dan distributor cenderung bertahan di pasar tradisional yang telah memiliki jaringan pelanggan tetap dan sistem distribusi yang lebih efisien. Mekanisme pasar alami (invisible hand) juga memperlihatkan bahwa distribusi ikan tetap berlangsung di luar sistem pasar modern, sehingga keberadaan PIM belum menjadi pusat utama aktivitas ekonomi perikanan.

Selain itu, prinsip pasar bebas (free market) memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk memilih lokasi dan sistem perdagangan yang paling menguntungkan, yang dalam praktiknya membuat PIM sulit bersaing dengan pasar tradisional. Di sisi lain, peran pemerintah (limited government) dalam pengelolaan pasar masih belum efektif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga kebijakan yang diterapkan belum mampu menarik partisipasi pelaku usaha secara signifikan. Dari aspek efisiensi dan kompetisi, PIM juga belum menunjukkan keunggulan kompetitif akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya jumlah pengunjung, serta kurangnya integrasi dengan kebutuhan pasar.

Lebih lanjut, hambatan operasional seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya infrastruktur, serta lemahnya pengawasan turut memperparah kondisi pasar. Faktor-faktor tersebut berdampak pada rendahnya daya saing dan kurangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pasar modern. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antar actor pemerintah, pedagang, distributor, dan pihak pengelola menjadi faktor krusial yang menghambat optimalisasi operasional PIM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan optimalisasi Pasar Ikan Modern Palembang tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh ketidaksinkronan kepentingan antar aktor, lemahnya implementasi kebijakan, serta ketidakmampuan pasar modern dalam beradaptasi dengan dinamika ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan pelaku usaha agar PIM dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan perikanan modern.

REFERENCES

Azisah, A. (2022). *Kontestasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Pemasaran Komoditi Sayuran*

(Olerikultura) = The Contestation of Modern and Traditional Markets in Vegetable Commodity Marketing (Olericulture).

Dharmawangsa, U. (2022). *Meningkatkan kinerja perusahaan logistik dengan pendekatan pengendalian operasional*.

Dr. Asep Nurjaman, M. S. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek*.

Ikhsan, A. M. (2023). *STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT*. 1–33.

Mohamad Stevan Alim, S.IP, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.

Yusri, M. (2020). Analisis Deskriptif Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. *Journal Sosial Humaniora Komunikasi*, *9*, 1689–1699.